

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teoretis

1. Konsep Partisipasi Politik

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi sangat terikat dengan partisipasi politik, karena negara yang menganut sistem demokrasi tidak bisa terpisahkan dari partisipasi politik dalam kehidupan politik negaranya. Ramdhani dkk (2022: 150) mengatakan bahwa partisipasi politik merupakan indikator penting dalam pelaksanaan demokrasi, artinya konsep partisipasi politik adalah ruang pelibatan yang digunakan untuk melaksanakan ruang aktivitas politik. Akan tetapi masyarakat atau warga negara yang bersangkutan pun harus memperhatikan tingkat partisipasi politik yang cukup tinggi, sehingga tingkat demokrasi negara tersebut tidak perlu diragukan lagi.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, diketahui bahwa partisipasi politik merupakan suatu indikator yang sangat penting dalam kehidupan politik negara yang menganut sistem demokrasi. Partisipasi politik disini bukan hanya sekedar memberikan hak suara dalam pemilihan, akan tetapi lebih dari itu yang menunjukkan bahwa sebagai warga negara turut serta aktif dalam menunjukkan partisipasi politik dalam kehidupan politik suatu negara. Oleh karena itu, pada subbab selanjutnya penulis akan memaparkan teori terkait pengertian dan esensi partisipasi politik, bentuk-

bentuk partisipasi politik, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik hingga hambatan dalam melakukan partisipasi politik.

1) Pengertian dan Esensi

Secara etimologi politik berasal dari bahasa Yunani yaitu “*politeia*” yang akar utamanya adalah “*polis*” yang memiliki arti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, dan “*teia*” yang berarti urusan. Selanjutnya menurut Sumarsono dkk (2006: 125) politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip kejadian, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki yang secara umum menyangkut proses penentuan tujuan negara dan cara melaksanakannya, pelaksanaannya pun membutuhkan kebijakan-kebijakan umum untuk mengatur, membagi atau mengalokasi sumber-sumber yang ada.

Dalam pendekatan politik, masyarakat adalah konsep induk sebab sistem politik hanya merupakan salah satu dari struktur yang membangun masyarakat, seperti sistem ekonomi, sistem sosial dan budaya, sistem kepercayaan, dan sebagainya. Sistem politik pun merupakan abstraksi (realitas yang diangkat ke alam konsep) seputar pendistribusian nilai di tengah masyarakat (Anggara, 2013: 9).

Setiap negara memiliki sistem politik yang berbeda sesuai dengan komponen yang ditentukan (Komara, 2015). Selain itu, Indonesia memiliki sistem yang penting bagi sistem politik di dunia, di mana sistem politik Indonesia akan berdampak pada sistem politik negara-

negara lain. Rancangan atau institusi kelembagaan Indonesia akan terus berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain dengan kuat, yang selanjutnya akan melahirkan sistem politik di Indonesia.

Makna sistem politik dapat dipahami dengan menguraikan atau menjabarkan setiap kata yang membentuk istilah sistem politik sehingga sejauh mungkin dapat diterima oleh umum (Anggara, 2013). Sistem memberikan manfaat dalam mengambil keputusan, serta memahami lingkungan yang saling berhubungan satu sama lain dan berfungsi untuk mencapai tujuan tertentu (Suminten, 2020). Sedangkan politik adalah kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu (Anggara, 2013).

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem politik merupakan bagian kegiatan yang berhubungan dengan keputusan publik dalam wilayah masyarakat tertentu yang berfungsi untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, dalam politik terdapat sebuah sistem yang berfungsi untuk menjembatani interaksi antara penguasa atau pemerintahan dengan masyarakat dalam segala proses pembuatan dan pengambilan kebijakan yang nantinya akan mengatur dan mengikat kebaikan masyarakat pada suatu wilayah tertentu. Pada dasarnya konsep sistem politik digunakan dalam keperluan analisis karena sistemnya bersifat abstrak dan terdiri dari beberapa variabel yang juga dapat diterapkan dalam situasi yang konkret, seperti negara, atau kesatuan yang lebih besar yang terdiri dari berbagai negara.

Selanjutnya menurut (Komara, 2015:117), sistem politik terdiri atas beberapa komponen, yaitu sebagai berikut:

- Masukan (*inputs*), yang terdiri dari tuntutan-tuntutan, dukungan-dukungan, dan sumber-sumber.
- Proses (*withinput*), yang mencakup proses mengubah masukan menjadi keluaran atau proses konversi.
- Keluaran (*output*), yakni hasil atau produk dari proses konversi yang berupa keputusan atau kebijakan.
- Lingkungan (*environment*), yaitu faktor-faktor dari luar yang mempengaruhi sistem politik seperti sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, keamanan, geografis, dan lainnya.
- Umpan balik (*feedback*), yaitu dampak dari pelaksanaan keputusan atau kebijakan, baik yang positif maupun negatif, yang dapat dimanfaatkan oleh sebuah sistem politik.

Selanjutnya menurut Eviany (2019: 31), politik dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu politik sebagai ilmu dan politik sebagai filsafat, yang keduanya memiliki pengertian dan objek persoalan utama yang berbeda. Politik sebagai ilmu menentukan berbagai prinsip yang dijadikan patokan dalam menjalankan pemerintahan dan berkaitan dengan produk hukum yang dikeluarkan atau dibuat oleh pemerintah

Partisipasi berasal dari bahasa inggris “*participation*” yang berarti mengambil bagian/keikutsertaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa “partisipasi” berarti: hal turut

berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta. Sedangkan politik dalam KBBI adalah segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan dalam bertindak menghadapi atau menangani suatu kebijakan atau suatu masalah. Berdasarkan kedua definisi tersebut, maka dapat didefinisikan bahwa partisipasi politik merupakan perkembangan keputusan gerakan yang terkait dengan dukungan dalam kehidupan politik dalam menjalankan pemerintahan.

Partisipasi politik sendiri merupakan konsep yang sudah populer dalam ilmu politik dan sistem politik, akan tetapi penggunaannya diterapkan dalam bermacam-macam kegiatan, sehingga menimbulkan pemahaman konsep yang berbeda-beda. Meskipun demikian, sebagian besar ilmuwan di bidang politik mengatakan bahwa partisipasi politik didefinisikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam kegiatan politik yang bertujuan untuk mempengaruhi proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah (Sitepu, 2012: 92).

Menurut Damsar (2010: 26-28) partisipasi politik merupakan kegiatan warga Negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut serta menentukan pemimpin pemerintahan, hal tersebut dapat digolongkan sebagai kegiatan partisipasi politik. Kegiatan ini mencakup beberapa tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan,

mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya partisipasi politik merupakan keikutsertaan warga negara untuk turut serta dalam proses demokrasi, khususnya dalam mempengaruhi pelaksanaan kebijakan jalannya pemerintah. Oleh karena itu, esensi dari partisipasi politik sangat penting dalam sistem politik suatu negara, khususnya bagi negara yang menganut sistem demokrasi dalam menjalankan pemerintahannya.

Menurut Sahid (2011: 184), partisipasi politik mempunyai fungsi bagi pemerintah, fungsi tersebut diantaranya untuk mendorong program-program pemerintah. Hal ini berarti bahwa peran serta masyarakat diwujudkan untuk mendukung program politik dan program pemerintah. Begitupun dalam suatu negara yang menerapkan sistem demokrasi, partisipasi politik ini menjadi bahan pertimbangan bahwa apakah negara tersebut sudah menerapkan demokrasi dengan baik atau belum. Partisipasi politik pun dapat ditempatkan sebagai *style of development* yang berarti bahwa partisipasi politik dalam kaitannya dengan proses pemerintahan haruslah diartikan sebagai usaha mentransformasikan sistem pembangunan suatu negara.

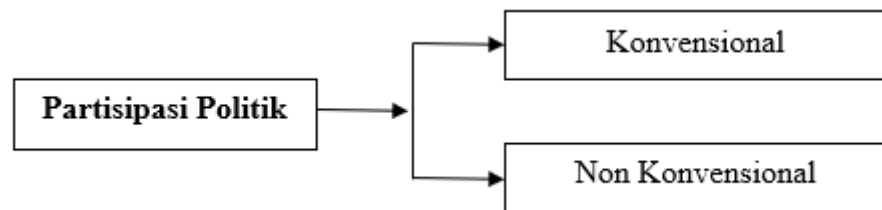
Oleh karena itu, partisipasi politik seharusnya diartikan sebagai suatu nilai kerja bagi masyarakat maupun pengelola pemerintahan sehingga partisipasi berfungsi sebagai mesin pendorong pembangunan.

Dalam kegiatan politik, partisipasi politik dari semua unsur masyarakat dengan kerjasama sukarela merupakan kunci utama bagi keberhasilan sistem politik suatu negara yang menganut sistem demokrasi (Liando, 2016). Dalam hal ini partisipasi politik berfungsi menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri (*self-reliance*) dalam usaha memperbaiki sistem politik di negaranya.

2) Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

Partisipasi politik terdapat beberapa jenis yang dilakukan masyarakat, dalam hal ini penulis menjelaskan dan merumuskan bentuk dari partisipasi politik baik itu yang bersifat memberikan dukungan terhadap sistem politik maupun pemerintah. Menurut Sahid (2011: 178-179) bentuk dari partisipasi politik secara umum adalah pemberian suara ketika dilakukannya pemilihan umum, akan tetapi secara lebih rinci, bentuk partisipasi politik itu tidak hanya memberikan suara saat pemilihan umum, tergantung dari sudut pandang mana bentuk partisipasi politik tersebut dilaksanakan.

Menurut Almond (Sahid, 2011: 62) mengemukakan bahwa partisipasi politik bisa muncul karena diawali dengan adanya kepentingan, maka hal itu akan menentukan untuk bentuk partisipasi politik selanjutnya. Terdapat dua jenis bentuk partisipasi politik menurut Almond (Sahid, 2011: 62) seperti yang tersaji pada gambar 2.1 di bawah ini.



Gambar 2.1 Bentuk Partisipasi Politik

(Sumber: Almond dalam Sahid, 2011)

Berdasarkan gambar 2.1 yang termasuk dalam bentuk partisipasi politik konvensional adalah partisipasi politik seperti pemberian suara (*voting*), ikut dalam diskusi politik, ikut kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, melakukan komunikasi individual dengan pejabat politik dan administrasi. Sedangkan yang masuk dalam bentuk partisipasi politik non konvensional seperti pengajuan petisi, demonstrasi, konfrontasi dan mogok. Bentuk partisipasi politik “Konvensional” adalah bentuk partisipasi yang normal dalam demokrasi modern. Sedangkan bentuk partisipasi politik “Non Konvensional” termasuk beberapa yang mungkin legal seperti petisi maupun yang ilegal, kekerasan dan revolusioner (Sahid, 2011: 63).

Selanjutnya menurut Sitepu dalam buku Teori-Teori Politik (2012: 100), Michael Rush dan Philip Althoff mengungkapkan bentuk-bentuk partisipasi politik secara hierarkis, yaitu sebagai berikut:

- a. Menduduki jabatan politik atau administrasi.
- b. Mencari jabatan politik atau administrasi
- c. Keanggotaan aktif dari suatu organisasi.

- d. Keanggotaan pasif dari suatu organisasi.
- e. Keanggotaan aktif dari suatu organisasi semu politik.
- f. Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi dan sebagainya.
- g. Partisipasi dalam diskusi politik informal dan juga minat umum dalam politik.
- h. Voting atau pemberian suara.
- i. Apati total.

Kemudian terdapat bentuk partisipasi politik yang dijelaskan oleh Cohen dan Uphoff dalam Kaho (2002: 57), yaitu sebagai berikut:

- a. Partisipasi dalam pembuatan keputusan.
- b. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil.
- c. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan
- d. Partisipasi dalam evaluasi.

Selain itu, menurut Rahman (2007: 48) partisipasi politik dapat dibedakan menjadi partisipasi aktif, pasif dan golongan putih, berikut merupakan penjelasannya:

- a. Partisipasi Aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses *input* dan *output* kegiatan politik.
- b. Partisipasi Pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada *output*, dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.

- c. Golongan Putih (golput) atau kelompok apatis, karena menganggap sistem politik yang ada menyimpang dari yang dicita-citakan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak bentuk partisipasi politik yang dapat dilakukan oleh warga negara dalam mendukung kegiatan politik negaranya, tidak hanya dalam kegiatan pemilihan umum akan tetapi dalam seluruh kegiatan sistem politik dan kegiatan pemerintahan.

3) Faktor Partisipasi Politik

Kegiatan partisipasi politik yang dilakukan oleh masyarakat ditentukan oleh berbagai faktor yang dapat mempengaruhinya dan mendorong warga negara tersebut untuk turut serta aktif dalam partisipasi politik. Menurut Sahid (2011: 185), faktor utama yang mendukung dan mendorong masyarakat dalam partisipasi politik adalah kepuasan finansial. Selanjutnya terdapat tiga unsur penting yang harus dimiliki oleh masyarakat untuk dapat terlibat dalam kegiatan partisipasi politik. Hal ini diungkapkan oleh Davis Keth dalam (Akbar, 2019: 145), yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya penyertaan pikiran dan perasaan.
- b. Adanya motivasi untuk berkontribusi.
- c. Adanya tanggung jawab bersama.

Dalam pelaksanaan partisipasi politik terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi dalam politik.

Hal tersebut sudah diutarakan oleh RR Emilia Yustiningrum dan Wawan Ichwanuddin dalam jurnal yang berjudul Partisipasi Politik dan Perilaku Memilih pada Pemilu 2014 (2015). Dikutip dari jurnal tersebut, partisipasi politik memiliki tiga faktor utama yang dapat mempengaruhi partisipasi politik, yaitu:

a. Faktor psikologis

Faktor psikologis biasanya dipengaruhi oleh orang terdekat, seperti orang tua dan keluarga. Selain itu ketertarikan antar individu juga dapat menjadi faktor psikologis dalam membicarakan isu mengenai politik.

b. Faktor ekonomi atau rasional

Faktor ekonomi dapat dipengaruhi oleh pemikiran individu terkait kondisi ekonomi diri, keluarga, dan nasional. Sehingga pertimbangan ekonomi ini menjadi pengaruh terhadap pilihan dan bentuk partisipasi politik setiap individu.

c. Faktor sosiologis

Faktor sosiologis mencakup aspek agama, pendidikan, tempat tinggal, usia, jenis kelamin, hingga tingkat ekonomi.

Semua aspek tersebut berpengaruh pada partisipasi politik masyarakat khususnya dalam penentuan pemimpin dalam menjabat pemerintahan. Sementara itu Menurut Milbrath dalam Sastroatmodjo (dalam Wardhani, 2018: 112) faktor yang mendorong pemilih pemula untuk terlibat dalam partisipasi politik pemilu, yaitu:

- a. Adanya kepekaan seseorang pada pematik politik, dimana dapat dilakukan melalui kontak pribadi maupun organisasi, dimana seseorang menjadi tertarik berpartisipasi dalam politik karena aktif dalam organisasi ataupun melihat media massa.
- b. Berkenaan pada karakteristik sosial yang berpengaruh pada partisipasi politik, yaitu terdapat banyak yang peduli terhadap hak politik yang dimilikinya.
- c. Sistem partai dan sistem politik suatu negara mempengaruhi dinamika pemilih pemula. Dalam negara demokratis, seseorang condong untuk berpartisipasi karena mencari dukungan massa.
- d. Terdapat perbedaan regional yang mempengaruhi perbedaan tingkah laku individu. Daerah yang kondusif akan menghasilkan pemilih yang berpartisipasi karena keinginan pribadi.

Berdasarkan penjelasan penjelasan di atas, diketahui bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi partisipasi politik warga negara, diantaranya karena faktor ekonomi, psikologis, sosiologis, kesadaran politik, penilaian masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, budaya, pendidikan dan lainnya.

4) Hambatan Partisipasi Politik

Dalam menjalankan partisipasi politik, terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat proses partisipasi tersebut. Menurut Heriyanto (2013), faktor yang dapat menghambat partisipasi politik dikelompokkan dalam tiga kategori, kategori tersebut tercantum pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Faktor Penghambat Partisipasi Politik

No	Kategori	Keterangan
1	Hambatan Struktural	Hambatan yang dipengaruhi oleh lingkungan politik, terutama bagi hal hal yang cenderung sentralisasi dengan mekanisme pembuatan rencana dan juga penentuan arah.
2	Hambatan Administratif	Sistem administrasi yang menguasai pengendalian pengambilan keputusan, alokasi sumber, informasi dan pengetahuan yang diperlukan masyarakat untuk dapat berperan dalam kegiatan politik secara efektif.
3	Hambatan Sosial	Hambatan ini erat kaitannya dengan mental akibat dari pengalaman sejarah seperti kesenjangan sosial, ketimpangan gender dan pembiasaan untuk hanya mengikuti orang lain dan tidak pernah mengambil keputusan sendiri tanpa paksaan.

(Sumber: Heriyanto, 2013: 5)

Selain dari tiga hambatan di atas, terdapat pendapat lain yang mengungkapkan faktor-faktor yang menghambat partisipasi politik. Menurut Wardhani (2018:112) faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses partisipasi politik masyarakat, diantaranya adalah kesibukan kegiatan sehari-hari, khususnya dalam kegiatan pemilihan umum yang pemilihnya adalah seorang pelajar, mahasiswa, dan pekerja. Tuntutan sebagai pelajar dan pekerja terkadang menjadi alasan utama bagi para pemilih enggan melakukan partisipasi politik dalam kegiatan pemilihan umum.

Kemudian faktor lainnya yaitu faktor minder atau *insecure*, biasanya dirasakan oleh masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah atau tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam

kegiatan berpolitik. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Mohtar Mas'oed (2008: 16), beliau berpendapat bahwa di samping pendidikan dan sosial ekonomi, perbedaan jenis kelamin juga mempengaruhi keaktifan seseorang dalam kegiatan partisipasi politik. Contohnya laki-laki lebih aktif berpartisipasi dari pada perempuan, orang yang berstatus sosial tinggi lebih aktif daripada orang yang berstatus sosial rendah.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, terdapat beberapa faktor-faktor yang dapat menghambat partisipasi politik, dimulai dari hambatan internal dari dalam diri hingga hambatan eksternal yang diperoleh dari lingkungan. Hal-hal yang menjadi hambatan tersebut, harus dapat ditangani dengan baik oleh diri pribadi dan pemerintah untuk dapat meningkatkan tingkat partisipasi politik di lingkungan masyarakat dan dalam kegiatan politik dan kegiatan pemerintahan.

2. Konsepsi Pondok Pesantren

Pondok pesantren merupakan salah satu jenis pendidikan Islam Indonesia yang bersifat tradisional untuk mendalami ilmu agama Islam dan mengamalkan sebagai pedoman hidup keseharian dan dalam kehidupan bermasyarakat yang telah hidup sejak ratusan tahun yang lalu, serta menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat muslim di Indonesia (Malik, 2005: 6). Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan ini umumnya diajarkan dengan cara klasikal, dimana seorang kiyai mengajarkan ilmu agama kepada santri berdasarkan kitab ajaran islam dan biasanya para santri tinggal di pondok atau asrama dalam pesantren tersebut

(Nizar, 2011: 286). Pesantren juga merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang eksistensinya sudah teruji oleh zaman, sehingga sampai saat ini masih bisa *survive* dengan berbagai dinamika perubahan pendidikan di Indonesia, selain itu pesantren memiliki kekhasan tersendiri dan berbeda dengan lembaga pendidikan lainnya (Oktavia, 2014: 11). Oleh karena itu, pada subbab berikut ini penulis akan menjabarkan terkait pengertian, fungsi dan tujuan dari konsepsi pondok pesantren.

1) Pengertian Konsepsi Pondok Pesantren

Konsepsi menurut Budhi (2018) secara singkat konsepsi adalah abstraksi dari ciri khas dan yang terwakili dalam suatu konsep untuk mempermudah pemahaman terhadap suatu konsep. Maka berdasarkan kedua pengertian di atas, dalam hal ini akan dijelaskan terkait konsepsi dari pondok pesantren sehingga dapat menjelaskan ciri khas dan konsep dari pondok pesantren untuk mengurangi miskonsepsi terhadap pengertian dari konsep pondok pesantren.

Peserta didik pada pondok disebut santri yang umumnya menetap di pesantren, sedangkan tempat dimana para santri menetap, di lingkungan pesantren, disebut dengan istilah pondok, dari sinilah timbul istilah pondok pesantren (Oktavia, 2014: 10). Pesantren merupakan lembaga dan wahana agama sekaligus sebagai komunitas santri yang “ngaji” ilmu agama Islam. Pondok pesantren sebagai lembaga tidak hanya identik dengan makna keIslaman, tetapi juga mengandung makna keaslian (*indigenous*) Indonesia, sebab

keberadaannya mulai dikenal pada periode abad ke 13-17 M, dan di Jawa pada abad ke 15-16 M (Ambary, 2001: 318). Dari penjelasan di atas, diketahui terdapat kesamaan terhadap pandangan pada pondok pesantren yang mana persamaan ini merujuk pada pendidikan agama Islam yang berciri khas pengajian syariat Islam dan ilmu agama atau dapat disimpulkan bahwa pondok pesantren adalah tempat para santri belajar ilmu agama Islam.

Umur pesantren sudah sangat tua dan tidak pernah lekang diterpa oleh perubahan zaman, terbukti meskipun pada saat ini banyak budaya dan tradisi yang masuk ke Indonesia khususnya di sektor pendidikan hal tersebut tidak menjadikan pesantren stagnan dan eksistensi pondok pesantren tetap kokoh karena pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan memiliki karakteristik tersendiri (Oktavia, 2014: 14). Keunikan pesantren terletak pada kuatnya proses tarik menarik antara sifat dasar tradisional dengan potensi dasar modernisasi yang progresif dan senantiasa berubah, pesantren juga memperhatikan kesopanan (tata krama) yang baik bagi para santrinya dan menjadi hal yang paling utama dan sudah menjadi ciri khas di berbagai pesantren yang ada di Indonesia (Aziz, 2014: 176). Tetapi seiring dengan perkembangan zaman kini pondok pesantren banyak yang menggunakan sistem klasikal, dimana ilmu yang dipelajari tidak hanya agama saja, melainkan ilmu umum juga dipelajari.

2) Fungsi Konsepsi Pondok Pesantren

Fungsi dari adanya konsepsi pondok pesantren yaitu untuk memudahkan pemahaman terkait pondok pesantren sehingga tidak adanya miskonsepsi dalam teori pondok pesantren dan penerapannya. Pesantren kini tidak lagi berfokus pada kurikulum yang berbasis keagamaan (*regional-based curriculum*) dan cenderung melangit, tetapi juga kurikulum yang menyentuh persoalan kikan masyarakat (*society-based curriculum*). Dengan demikian, pesantren tidak bisa lagi didakwa semata-mata sebagai lembaga keagamaan murni, tetapi juga (seharusnya) menjadi lembaga sosial yang hidup yang terus merespons persoalan masyarakat di sekitarnya (Nizar, 2011: 288).

Pada 1980-an, pesantren institusi pendidikan Islam khas Indonesia memasuki dunia baru. Pada tahun-tahun itu, pesantren mulai terlibat bahkan bahkan kemudian menjadi *leader* di dalam kegiatan masyarakat yang sebelumnya telah menjadi wacana penting di kalangan intelektual dan aktivis muslim Indonesia, namun saat ini peranan pondok pesantren besar dalam kehidupan sosial keagamaan masyarakat Indonesia dan termasuk kehidupan politik, pondok pesantren memiliki peranan yang sangat penting dalam mengembangkan wilayah di Indonesia (A'la, 2006: 7).

Menurut Ramayulis (2008: 14). Secara mendasar berikut ini merupakan fungsi dan peranan dari pondok pesantren yang lebih fungsional dan berpotensi terus berkembang, antara lain yaitu:

- Pusat keagamaan, pendidikan dan kajian Islam
- Pusat pengembangan dakwah islamiyah
- Pusat pelayanan beragama dan moral
- Pusat pengembangan solidaritas dan ukhuwah Islamiyah

3) Tujuan Konsepsi Pondok Pesantren

Tujuan dari adanya konsep pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan islam menurut Ramayulis (2008: 18) ada dua, yaitu yaitu a) Tujuan keagamaan maksudnya ialah beramal untuk akhirat sehingga ia menemui tuhan b) Tujuan ilmiah yang bersifat keduniaan yaitu apa yang diungkapkan oleh pendidikan modern dengan tujuan kemanfaatan atau persiapan untuk hidup. Jadi pada dasarnya konsep pondok pesantren ini bukan hanya membahas agama tapi membahas juga terkait sifat keduniaan dengan bermaksud dapat menjalankan kehidupan dengan kebermanfaatan.

Pesantren sebagai salah satu sub sistem Pendidikan Nasional yang *indigenous* Indonesia, mempunyai keunggulan dan karakteristik khusus dalam pengaplikasian pendidikan karakter santri. Hal itu dikarenakan: pertama, adanya jiwa dan falsafah. Kedua, terwujudnya integritas dalam jiwa, nilai, sistem dan standar operasional pelaksanaan. Ketiga, terciptanya tripusat pendidikan yang terpadu. Keempat adalah totalitas pendidikan.

Pesantren mengemban beberapa peran, utamanya sebagai lembaga pendidikan. Jika ada lembaga pendidikan Islam yang sekaligus

juga memainkan peran sebagai lembaga bimbingan keagamaan, keilmuan, kepelatihan, pengembangan masyarakat, dan sekaligus menjadi simpul budaya, maka itulah pondok pesantren (Mutohar, 2013: 198). Ini menunjukkan bahwa pondok pesantren tidak kaku terhadap perkembangan zaman. Selain itu, pesantren juga mempunyai akar sosial yang kuat hingga menyentuh lapisan masyarakat paling bawah. Maka, dapat diketahui bahwa pondok pesantren relevan dengan pendidikan Islam sebagai pusat perkembangan pendidikan melalui kegiatan penyebaran agama.

3. Politik di Pondok Pesantren

Pentingnya partisipasi politik di dunia pendidikan perlu ditekankan dalam rangka membangun kesadaran diri dalam turut serta pada sistem politik Indonesia, termasuk di lingkungan pendidikan agama seperti pondok pesantren. Tidak hanya meningkatkan pengetahuan berpolitik, akan tetapi pemahaman dan kesadaran tentang hak dan kewajiban dalam negara yang menjunjung tinggi nilai demokratis, maka partisipasi politik memiliki peran yang besar. Pada subbab berikut ini penulis akan menjabarkan terkait pondok pesantren, konsep dan esensi partisipasi politik di pondok pesantren hingga bentuk partisipasi politik di pondok pesantren.

1) Pengertian dan Esensi

Secara etimologi pondok diturunkan dari bahasa Arab “*funduq*” yaitu pondok yang artinya ruang tidur atau wisma, sementara itu pesantren berasal dari kata akar “santri”, dengan awalan “pe” dan

akhiran “an” yang menunjukkan tempat, sehingga pondok pesantren dapat diartikan sebagai tempat para santri. Brumund dalam Zamakhsyari (2011: 38) mengungkapkan bahwa pondok pesantren merupakan sistem pendidikan islam yang tumbuh sejak awal kedatangan islam di Indonesia yang dalam perjalanan sejarahnya telah menjadi objek penelitian para sarjana yang mempelajari islam di wilayah Indonesia, yaitu sejak Brumund menulis sebuah buku tentang sistem pendidikan di Jawa pada tahun 1857.

Sebelum tahun 1960-an, pusat-pusat pendidikan pesantren di Indonesia lebih dikenal dengan nama pondok. Istilah pondok berasal dari pengertian asrama-asrama para santri atau tempat tinggal yang dibuat dari bambu. Berdasarkan asal-usul kata santri, para ahli berpendapat bahwa lembaga pesantren pada dasarnya adalah Lembaga Pendidikan Keagamaan bangsa Indonesia pada masa menganut agama Hindu Buddha yang bernama *mandala* yang diislamkan oleh para kyai.

Dalam membentuk pesantren diperlukan beberapa komponen-komponen, yaitu sebagai berikut (Dhofier, 2011: 79-99) :

a. Pondok

Pondok merupakan asrama atau tempat belajar para santri yang berada dalam lingkungan komplek pesantren yang berfungsi sebagai ruangan untuk belajar dan kegiatan keagamaan lainnya. Selain itu, pondok digunakan untuk berbagai kegiatan lainnya yang

mendukung kegiatan di pesantren seperti perlombaan hingga sebagai tempat untuk saling bersosialisasi.

b. Masjid

Masjid merupakan elemen yang tak dapat dipisahkan dari pondok pesantren dan pendidikan berbasis islami. Masjid dianggap sebagai tempat yang tepat untuk mendidik para santri, terutama dalam praktik sembahyang jum'at, dan pengajaran kitab-kitab Islam klasik, pengajian hingga pengajaran bagi santri yang dilakukan oleh pengajar maupun pengurus pondok.

c. Pengajaran Kitab Islam Klasik

Pengajaran ini merupakan salah-satu pengajaran formal yang diberikan di lingkungan pesantren. Tujuan utamanya adalah untuk mendidik calon-calon utama, dan bertujuan untuk mencari pengalaman dan pendalaman perasaan keagamaan. Kitab Islam klasi yang biasanya diajarkan di pesantren dapat digolongkan menjadi 8 kelompok yaitu Nahwu (syntax) dan Sharaf (morfologi), Fiqh, Ushul Fiqh, Tafsir, Hadits, Tauhid, Tasawuf dan Etika serta cabang-cabang lain seperti Tarikh dan Balaghoh.

d. Kyai

Kyai adalah guru agama yang dipercaya untuk mengajarkan ilmunya kepada para santri. Kyai merupakan elemen esensial dari pesantren. Menurut asal usulnya, kyai dalam bahasa Jawa dipakai untuk tiga jenis gelar, yaitu sebagai berikut:

- a) Gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap keramat.
- b) Gelar kehormatan untuk orang-orang tua pada umumnya.
- c) Gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi pemimpin pesantren.

e. Pengajar

Pengajar di pondok pesantren biasanya disebut dengan ustadz (pengajar laki-laki) atau ustadzah (pengajar perempuan). Ustadz dan ustadzah ini dapat diartikan sebagai guru, pengajar atau pendidik yang mengajar dan membimbing para santri di pondok pesantren. Tugas utamanya yaitu mengajarkan ajaran islam, membimbing dalam ibadah dan membimbing dalam perilaku serta pengalaman etika berdasarkan ajaran agama islam.

f. Pengurus Pondok

Pengurus pondok adalah sekelompok orang yang sudah ditunjuk oleh pimpinan pondok pesantren untuk mengawasi santri yang berada di dalam pondok pesantren. Sehingga biasanya pengurus pondok memiliki tanggung jawab untuk membimbing, mengontrol dan mengawasi kegiatan santri agar tetap terjaga sesuai ajaran islam dan ketentuan peraturan pondok pesantren.

g. Santri

Menurut pengertian yang digunakan dalam lingkungan orang-orang pesantren, seorang alim hanya bisa disebut kyai bilamana memiliki pesantren dan santri yang tinggal dan menuntut ilmu di

dalamnya. Oleh karena itu satri merupakan elemen penting dalam suatu lembaga pesantren atau pondok pesantren. Menurut tradisi yang ada, santri dapat dibagi menjadi dua:

- a) Santri Mukim, yaitu santri yang tinggal di pondok pesantren. Tinggal disini maksudnya selalu berada di area pondok, dimulai dari belajar hingga tempat tidur yang biasa disebut *kobong*.
- b) Santri Kalong, yaitu santri yang datang ke pesantren hanya pada saat jam pelajaran berlangsung, setelah itu pulang ke rumah masing-masing. Santri kalong biasanya berasal dari daerah sekitar pesantren.

2) Konsep Partisipasi Politik di Pondok Pesantren

Partisipasi politik di lingkungan pondok pesantren erat kaitannya dengan partisipasi politik yang dilakukan oleh santrinya. Santri dalam pengertian K.H Imam Sonhaji (Dalam Nasikin dan Yani, 2014: 113) berasal dari kata san dan tri. San artinya harus pandai, tri artinya tiga, maksudnya adalah santri harus menguasai tiga hal utama, yaitu: 1) pandai ilmu agama, 2) pandai ilmu kemasyarakatan, 3) pandai ilmu kenegaraan. Pandai ilmu agama menyangkut pemahaman yang mendalam tentang agama sehingga suatu saat tampil sebagai pemimpin agama. Pandai ilmu kemasyarakatan menyangkut masa depan santri yang akan terjun ke masyarakat, dan bahkan jadi tokoh masyarakat yang mampu mewarnai lingkungan masyarakatnya. Sedangkan pandai dalam ilmu kenegaraan ditujukan untuk menjadi warga Negara yang baik,

dalam arti faham tentang kewajiban dan hak warga Negara, bahkan tidak mustahil mewakili masyarakat dalam ikut serta meluruskan arah yang ditempuh oleh Negara.

Menurut Heriyanto (2013) partisipasi politik salah satunya dipengaruhi oleh kepercayaan. Contohnya dalam Islam mendorong umatnya atau pemeluknya untuk memerintahkan memilih pemimpin yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran, mengkritik dan seterusnya, hal ini dapat mendorong pribadi dalam melakukan partisipasi politik.

Berdasarkan pernyataan di atas, diketahui bahwa santri di lingkungan pendidikannya yakni di pondok pesantrenpun harus memahami bahkan harus aktif turut serta dalam partisipasi politik untuk mendukung pandai ilmu kemasyarakatan dan pandai ilmu kenegaraan untuk dapat memilih pemimpin yang baik dan dapat meluruskan yang kurang tepat dalam lingkungan politik dan lingkungan pemerintahan.

Santri dapat dipandang sebagai massa politik yang memiliki sumber daya potensial, karena ketaatannya dan jaringannya yang sangat luas dan banyak di seluruh Indonesia. Jaringan santri pun tidak hanya terpaku didalam pesantren, namun menyerebak luas secara umum di masyarakat dengan adanya santri kalong. Keberadaan santri ini dinilai sebagai lumbung suara yang potensial guna meningkatkan partisipasi politik di lingkungan masyarakat, kegiatan politik hingga kegiatan pemerintahan (Pasa dan Marzuki, 2021).

Peran pesantren di masa sekarang juga amat jelas. Contoh yang paling nyata adalah sulitnya pemerintah memasyarakatkan program bila tidak melalui pemimpin pesantren. Contoh lainnya adalah banyaknya pemimpin politik mendekati pesantren, terutama menjelang pemilihan umum. Perilaku para pemimpin itu tepat, bila mereka tidak memperhatikan pondok pesantren, berarti visi politik mereka rendah (Pasa dan Marzuki, 2021).

Politik di pondok pesantren ini menjadi sebutan bagi kegiatan politik yang dilakukan aktivis politik dari komunitas yang selama ini dikenal lebih taat terhadap berbagai aturan dalam sistem ajaran islam. Mereka sering mengklaim mewakili suara mayoritas rakyat atas argumen mayoritas rakyat itu memeluk agama islam.

Keterkaitan santri terhadap politik Indonesia dapat ditelusuri dari organisasi kelembagaan islam yang bernama Serikat Dagang Islam (SDI) yang berdiri pada awal abad 20 atau lebih tepatnya pada tahun 1909 di Bogor. Meskipun tujuan didirikannya SDI adalah untuk perdagangan atau sebagai perhimpunan pedagang muslim agar mampu bersaing dengan pengusaha nonmuslim seperti tionghoa India, maupun Barat. Namun lambat laun seiring perkembangannya tujuan dari SDI bertambah menjadi alat dalam melakukan gerakan perlawanan terhadap penjajah. Setelah itu baru muncul Muhammadiyah lalu Nahdlatul Ulama (NU). Meskipun organisasi tersebut bukanlah sebuah partai

politik, namun organisasi tersebut dapat menggerakkan santri di Indonesia ke ranah politik.

Pola politik yang dilakukan santri Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami kemajuan dari berdirinya SDI hingga sekarang. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya kegiatan kelompok islam dalam membangun kekuatan politik serta bagaimana pola-pola kecenderungan perilaku politik islam dari masa ke masa. Pada masa pascareformasi tokoh islam dan santri memiliki ruang berpolitik yang cukup besar. Demokrasi yang mulai terbuka membebaskan hampir semua khalayak untuk berpartisipasi dalam politik termasuk para santri asal tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, hal ini menyebabkan pola politik menjadi samar. Pada kenyataannya kaum Islam yang taat tidak hanya berkecimpung di partai Islam, banyak juga yang memilih partai yang notabene bukan partai Islam. Begitupun secara perilaku politik mereka tidak bisa dikelompokkan dengan pola “agamis”.

Kesadaran para santri sebagai warga negara yang baik tercermin di pondok pesantren ini dengan kesadaran mereka dalam berpartisipasi politik, seperti menggunakan hak pilih hingga mengikuti berbagai kegiatan politik (Pasa dan Marzuki, 2021). Mobilisasi politik di pondok pesantren sangat dipengaruhi oleh pengetahuan politik dari para santrinya, hal tersebut diperkuat dengan Miaz (2012: 87) yang menunjukkan kesadaran politik dan pendidikan politik yang tinggi berakibat pada tingginya tingkat partisipasi politik. Selain itu,

pernyataan tersebut sejalan dengan hasil dari penelitian (Siregar & Ernas, 2010:113) yang menyatakan bahwa selain kesadaran santri, pihak pondok pesantren harus memberikan pendidikan politik yang baik, sehingga santri dapat memberikan pandangan mengenai mana yang baik dan mana yang tidak baik dalam kehidupan berpolitik.

Selain itu, menurut Pasa dan Marzuki (2021: 526), pengajar di pondok pesantren atau Ustadz/dzah sebagai guru di pondok pesantren memiliki kredibilitas moral dan kemampuan mempertahankan pranata sosial yang diinginkan, sehingga memiliki wibawa dan sebagai penyaring informasi yang masuk ke lingkungan santri dan mengajakan hal hal yang berguna. Oleh karena itu pengajar di pondok pesantren ini memiliki hubungan erat dengan santrinya, dan pola hubungan ini akan melahirkan sikap loyal dan kepatuhan yang tinggi.

Begitupun dengan pengurus pondok yang biasa mengawasi kegiatan santri yang memiliki kemampuan untuk memberikan informasi dan menyaring informasi yang menyebar luas di kalangan santri, termasuk terkait politik. Pengajar dan pengurus memiliki peran yang besar terhadap ilmu dan pengetahuan santrinya untuk menjadi warga negara yang baik khususnya dalam menunjukkan partisipasi politiknya.

3) Bentuk Partisipasi Politik di Pondok Pesantren

Sebuah pesantren pada dasarnya adalah sebuah asrama pendidikan Islam tradisional di mana siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan seorang guru yang lebih dikenal dengan

sebutan kyai. Sebagai lembaga pendidikan, pesantren juga memiliki peranan dalam berpolitik khususnya dalam mengajarkan santri dan pengurusnya untuk melek politik dan berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin guna membangun sistem pemerintahan yang baik bagi Indonesia. Menurut Pasa dan Marzuki, (2021: 95) berikut ini merupakan beberapa contoh partisipasi politik yang dapat dilakukan santri di lingkungan pendidikan yang dapat dilakukan adalah:

- a) Mengikuti kegiatan organisasi kesiswaan yang dibentuk sekolah guna meningkatkan minat dan kemampuan peserta didik di bidang non-akademik.
- b) Mengikuti pemilihan ketua dan pengurus kelas.
- c) Tidak golput dalam pemilihan ketua dan pengurus kelas.
- d) Aktif berpartisipasi dalam musyawarah di lingkungan sekolah.
- e) Aktif dalam menyuarakan aspirasi.
- f) Melakukan interaksi yang demokratis antara peserta didik, guru, dan wali murid.
- g) Guru memberikan pendidikan mengenai kesadaran berpolitik.

Sosialisasi politik memberi tanda umum hasil belajar sosial cara politik berperilaku dan pertemuan terkait dengan informasi, nilai, dan mentalitas politik tertentu. Ada dua hal yang penting dan menarik mengenai proses ini, pertama, sosialisasi politik bisa langsung melalui pendidikan, dan yang kedua adalah melalui proses tidak langsung yang disebabkan latar belakang kehidupan seseorang.

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 dijelaskan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik, agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Berdasarkan hal ini, maka pendidikan nasional merupakan salah satu dasar dan tujuan dari pendidikan nasional yang seharusnya menjadi acuan bangsa Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, bentuk keterlibatan pesantren atau santri dalam politik Indonesia bisa dilihat dari berbagai macam kegiatan sesuai dengan peran yang dimainkan oleh Kyai, atau Ustaz, serta santri itu sendiri. Santri dapat terlibat langsung sebagai praktisi dan aktor politik yang terjun sebagai pengurus atau aktivis partai politik. Santri juga dapat menjadi kekuatan pendukung partai politik tertentu dengan cara memberikan dukungan dibalik layar maupun di sosial media. Santri juga dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum presiden, legislatif, kepala desa, hingga pemimpin santri.

Selain santri, pengurus dan pengajar yang usianya cukup dewasa untuk menjadi bagian dari partai politik, tim sukses, ataupun mencalonkan diri menjadi pemimpin di pemilihan umum merupakan salah satu bentuk partisipasi politik yang dapat dilakukan. Akan tetapi

dengan pengajaran ilmu politik, pengajaran sistem demokrasi, ajakkan untuk menggunakan suara dalam pemilihan umum, mengizinkan santri untuk memilih sesuai pilihannya, melakukan simulasi pemilihan, melakukan banyak kegiatan demokrasi di lingkungan pesantren merupakan bentuk partisipasi politik lainnya yang dapat dilakukan oleh pengajar dan pengurus pondok pesantren.

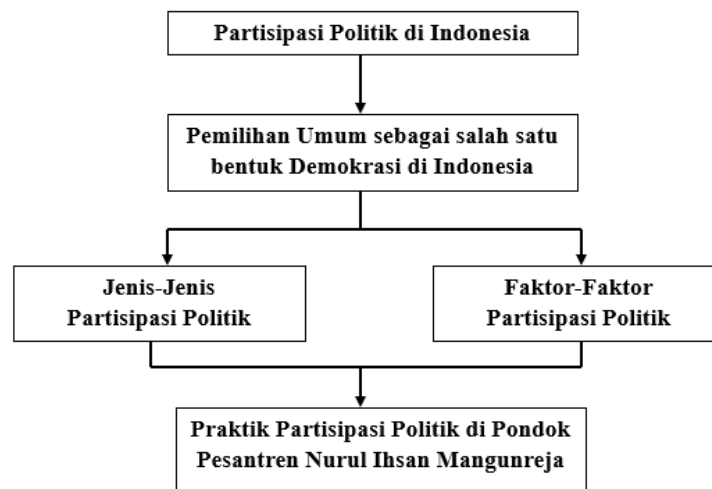
B. Kerangka Pemikiran

Kerangka diperlukan agar penelitian ilmiah atau penulisan laporan penelitian dilakukan secara terarah dan sederhana untuk dipahami dan diselesaikan. Dengan temperamen, penulis ternyata lebih mengenal proses kerjanya atau bisa dikatakan dia mengerti hal-hal apa yang harus dibedah terlebih dahulu. Demikian pula, struktur pemikiran antar penulis tidak selalu sama, oleh karena itu diperlukan sebuah kerangka pikiran. Kerangka pikiran ini juga sering disebut sebagai kerangka berpikir yang biasanya berbentuk bagan yang menguraikan tugas-tugas penting yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Menurut Muchson (2017: 23) kerangka berfikir merupakan model konsep yang menggambarkan hubungan antara variabel yang dibangun dari berbagai teori untuk dianalisis secara sistematis dan kritis.

Snelbecker dalam Moleong (2016: 34) menjelaskan bahwa kerangka pemikiran sebagai seperangkat proposisi yang terintegritasi secara sintaksis, yaitu mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan yang lainnya dengan kata dasar yang diamati, dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati. Polancik

(2009: 58) mengatakan bahwa kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang memiliki peran sebagai alur logika sistematis dari tema yang akan ditulis nantinya. Kerangka berpikir ini disusun berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang akan digunakan pada penelitian. Kemudian, dari pertanyaan-pertanyaan penelitian itu menghasilkan suatu konsep yang saling terhubung, sehingga dapat menggambarkan alur penelitian.

Dalam membuat kerangka pemikiran, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti melakukan observasi, melakukan kajian pustaka, dan mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan topik pembahasan. Gambar 2.2 berikut ini merupakan bentuk kerangka pikiran pada penelitian ini.



Gambar 2.2 Kerangka Berfikir

C. Penelitian Terdahulu

Usulan penelitian ini tidak terlepas dari hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan kajian. Penelitian yang relevan dengan jenis dan judul penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian dengan

skripsi berjudul “Partisipasi Politik Santri pada Pemilihan Bupati Aceh Barat 2017” yang ditulis oleh Sudarman Alwy dan Reza Febriandi Universitas Teuku Umar. Dalam hasil penelitiannya, menyimpulkan bahwa partisipasi politik santri dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Aceh Barat adalah partisipasi pasif dengan bentuk partisipasi konvensional dan berada pada hirarki terendah atau satu level di atas sikap apatis (golput), karena santri hanya menggunakan hak politiknya yang terbatas pada memilih salah satu calon Kepala Daerah dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2017. Hal ini dikarenakan pimpinan tidak memberikan izin kepada santri untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik secara aktif, namun hanya memberikan izin untuk pulang ke kampung masing-masing pada saat hari pencoblosan saja.

Penelitian lain yang relevan adalah skripsi dengan judul “Peran Sekolah Sebagai Sarana Sosialisasi Politik untuk Meningkatkan Partisipasi Politik pada Pemilih Pemula” yang disusun oleh Asmika Rahman, Universitas Negeri Yogyakarta. Dari penelitiannya dapat diketahui bahwa peran sekolah sebagai sarana sosialisasi politik untuk meningkatkan partisipasi politik pada pemilih pemula dapat dikemukakan simpulan sebagai berikut.

1. Sarana sosialisasi politik yang sangat berperan penting dalam mempengaruhi sikap politik pemilih pemula adalah keluarga dan sekolah. Selain itu ada juga sarana-sarana sosialisasi politik yang ikut berperan serta, diantaranya seperti teman sebaya, media massa, kelompok profesi/kerja, kelompok agama, dan kontak-kontak politik langsung.

2. Bentuk partisipasi politik seseorang dapat dibagi menjadi dua macam, konvensional dan non konvensional.
3. Pemilih pemula adalah warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih berdasarkan ketentuan undang-undang pemilihan umum dengan usia minimal 17 tahun atau sudah/ pernah kawin serta baru pertama kali mendapatkan hak suara pada saat pemilu dilaksanakan.
4. Perilaku pemilih (voting behavior) dapat dianalisis dengan tiga pendekatan, a) Pendekatan Sosiologis; b) Pendekatan Psikologis; dan c) Pendekatan Rasional.
5. Ada tiga klasifikasi tipe-tipe orientasi politik: a) Orientasi kognitif, b) Orientasi afektif dan c) Orientasi evaluatif

Tabel 2.2 berikut ini merupakan ringkasan penelitian terdahulu terkait partisipasi politik di lingkungan pendidikan khususnya di pondok pesantren.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Judul	Hasil
1	Partisipasi politik santri pada pemilihan Bupati Aceh Barat 2017 (Sudarman Always dan Reza Febriandi)	Bentuk partisipasi yang dilakukan yaitu partisipasi pasif dan konvensional dengan hirarki terendah diatas apatis, karena santri-santri hanya menggunakan hak politiknya terbatas, karena izin pihak pesantren yang hanya memberikan izin pada waktu hari pemilihan saja untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik tersebut.
2	Peran sekolah sebagai sarana sosialisasi politik untuk meningkatkan partisipasi politik pada pemilih pemula (Asmika Rahman)	Sarana sosialisasi politik di lingkungan pendidikan sangat penting dalam mempengaruhi partisipasi politik, dan terdapat pengaruh partisipasi politik dari teman, media, kelompok agama dan kontak-kontak politik langsung.